



## Implementasi Indonesia Portnet dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pengguna Jasa di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit

Rizky Davela Bagas Waskito<sup>1</sup>, Sofjan Aripin<sup>2</sup>, Asima Yanty Siahaan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Terbuka, [arlenerazkasabreen@gmail.com](mailto:arlenerazkasabreen@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Terbuka, [sofjan@ecampus.ut.ac.id](mailto:sofjan@ecampus.ut.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Sumatra Utara, [asimayantysiahaan@gmail.com](mailto:asimayantysiahaan@gmail.com)

Corresponding Author: [arlenerazkasabreen@gmail.com](mailto:arlenerazkasabreen@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the implementation of the Indonesia PortNet (Inaportnet) system in improving the quality of port services at the Office of Harbormaster and Port Authority (KSOP) Class III Sampit. The application of this system is part of the public service digitalization policy initiated by the Indonesian Ministry of Transportation. Using a qualitative approach through interviews, observations, and document analysis, the study found that Inaportnet has had a positive impact on service efficiency and transparency. However, its implementation has not been fully optimized. The main challenges include limited user understanding of the digital system, inadequate human resources, and complex bureaucratic structures. Based on George C. Edward III's policy implementation theory, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are critical factors influencing success. Therefore, enhanced outreach, capacity building, and procedural simplification are needed to improve the effectiveness of Inaportnet.*

**Keyword:** *Inaportnet, Policy Implementation, Public Service, KSOP, Port Digitalization.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem Indonesia PortNet (Inaportnet) dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi pelayanan publik oleh Kementerian Perhubungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inaportnet telah membawa dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta struktur birokrasi yang kompleks. Berdasarkan analisis teori implementasi kebijakan George C. Edward III, ditemukan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat memengaruhi keberhasilan implementasi. Dengan demikian, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan efektivitas sistem Inaportnet.

**Kata Kunci:** Inaportnet, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, KSOP, Digitalisasi Kepelabuhanan.

## PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kapal dan barang di pelabuhan, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai regulasi agar lebih efisien dan mampu menarik investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara elektronik yang dikenal dengan Indonesia National Single Window (INSW). Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses pelayanan di pelabuhan melalui sistem digital yang efektif dan efisien. Optimalisasi pelayanan pelabuhan memiliki dampak langsung terhadap kelancaran arus lalu lintas laut dan transportasi nasional secara keseluruhan, yang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan sistem transportasi nasional yang andal dan terpadu. Pelayanan bongkar muat juga menjadi aspek teknis penting dalam mengatasi permasalahan Dwelling Time di pelabuhan (Vandawati, 2019).

Salah satu bentuk nyata dari implementasi INSW adalah hadirnya sistem Indonesia Portnet atau Inaportnet. Inaportnet merupakan sistem layanan tunggal yang digunakan untuk pengurusan dokumen kapal, bongkar muat, dan dokumen kepelabuhanan lainnya secara elektronik dan terstandar. Sistem ini diterapkan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet dan Tata Kelola Inaportnet. Sebelum kehadiran Inaportnet, pelayanan di pelabuhan, termasuk di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit, masih dilakukan secara manual. Melalui implementasi aplikasi Inaportnet, pelayanan ditujukan agar lebih cepat, mudah, dan tanpa harus dilakukan secara tatap muka. Namun, menurut Malisan dan Trisnawati (dalam Andromeda & Putra, 2020), pelaksanaan sistem Inaportnet belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan kendala teknis yang menghambat pelaksanaannya secara maksimal. Meskipun proses clearance kapal telah berubah dari sistem manual menjadi online, berbagai hambatan seperti keterbatasan pemahaman pengguna, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan teknis pihak terkait masih menjadi tantangan besar. Sistem Inaportnet ini melibatkan banyak pihak seperti instansi pemerintah, badan usaha pelabuhan, shipping agent, freight forwarder, PPJK, importir dan eksportir, depo container, warehouse, serta transportasi darat.

KSOP Kelas III Sampit sendiri telah mengadopsi sistem Inaportnet sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Transformasi ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan pelayanan manual sebelumnya yang cenderung lambat dan penuh birokrasi. Akan tetapi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KSOP Kelas III Sampit masih menghadapi tuntutan besar untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan prima. Menurut Maharani (2023), pelayanan yang buruk tidak hanya berdampak pada kualitas birokrasi, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan pengguna jasa yang pada akhirnya dapat menggerus legitimasi lembaga pemerintah. Persepsi negatif dari masyarakat mengenai pelayanan publik akan merusak kepercayaan terhadap kapasitas dan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan yang transparan dan profesional. Buruknya pelayanan pelabuhan juga mengganggu kelancaran rantai logistik yang berperan penting dalam distribusi barang. Hambatan dalam proses pelayanan dapat meningkatkan biaya logistik, menyebabkan keterlambatan distribusi, serta berdampak pada aktivitas bisnis baik lokal maupun internasional. Pelayanan yang tidak profesional juga dapat menurunkan minat investor karena menciptakan iklim usaha yang tidak pasti (Maharani, 2023). Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempersempit lapangan kerja. Tidak hanya itu, apabila pelayanan yang buruk mencakup aspek keselamatan dan keamanan, maka risiko kecelakaan di area pelabuhan akan meningkat, yang bukan hanya mengancam keselamatan

jiwa, tetapi juga merusak lingkungan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan pemerintah.

Implementasi Inaportnet di KSOP Kelas III Sampit dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman terhadap sistem oleh pengguna jasa, keterbatasan kapasitas server, serta perlunya harmonisasi dengan regulasi yang ada. Selain itu, partisipasi dan pemahaman para pihak terkait juga sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem ini. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi Inaportnet di KSOP Kelas III Sampit serta kendala dan tantangan yang dihadapi, dibandingkan dengan pelayanan manual sebelumnya yang dianggap kurang efektif karena berbelitnya birokrasi. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif akan digunakan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, serta analisis dokumen. Data akan dianalisis untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait implementasi Inaportnet di KSOP Kelas III Sampit. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi sistem, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan ke depan dalam mendukung program PTSP nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merujuk pada teori implementasi kebijakan dari Edwards III (1980) yang menyebutkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, komunikasi yang belum merata membuat banyak pengguna jasa belum memahami penggunaan Inaportnet. Sementara itu, dari sisi sumber daya, banyak admin di perusahaan yang masih awam terhadap teknologi digital dan internet, sehingga mengalami kesulitan. Faktor disposisi juga berpengaruh, seperti sikap dan respon pengguna jasa terhadap peralihan sistem manual ke digital. Terakhir, struktur birokrasi yang kompleks dan melibatkan banyak stakeholder turut menentukan sejauh mana Inaportnet dapat diimplementasikan secara efektif. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi Inaportnet di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit? (2) Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan Inaportnet di Kantor tersebut? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi dan mengidentifikasi kendala serta potensi pendukung agar pelayanan kepelabuhanan dapat meningkat secara optimal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi *Indonesia PortNet (Inaportnet)* dalam pelayanan kepada pengguna jasa di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit. Pendekatan ini dianggap sesuai karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, serta persepsi individu dalam konteks sosial dan budaya tertentu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok. Denzin dan Lincoln (2011) menambahkan bahwa pendekatan ini menekankan pada dinamika sosial yang kompleks, sementara Silverman (2013) menyatakan bahwa metode ini lebih menekankan pada deskripsi naratif daripada numerik. Dengan demikian, metode kualitatif memberikan fleksibilitas dalam mengevaluasi efektivitas, efisiensi, serta kendala yang mungkin muncul dalam implementasi Inaportnet di lingkungan KSOP Kelas III Sampit. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis:

1. Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan survei kepada para aktor utama dalam pelaksanaan Inaportnet, yaitu:
  - a. Kepala KSOP Kelas III Sampit
  - b. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli
  - c. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan

d. Pengguna jasa: agen pelayaran, perusahaan bongkar muat, dan petugas operator Inaportnet.

Survei kepuasan masyarakat juga dilakukan melalui aplikasi resmi Kementerian Perhubungan yaitu Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) yang memberikan data secara real-time.

2. Data Sekunder: Meliputi dokumen resmi, laporan internal, peraturan terkait Inaportnet, dan arsip administrasi yang mendukung pelaksanaan sistem di KSOP Sampit.

Narasumber dipilih secara purposive dengan kriteria relevansi dan keterlibatan langsung dalam implementasi Inaportnet. Profil narasumber dijabarkan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Peran dalam Implementasi Inaportnet	Lama Pengalaman
1	Kepala KSOP Kelas III Sampit	Pengambil kebijakan dan supervisi utama	10 tahun
2	Kepala Seksi Keselamatan Berlayar	Pelaksana teknis operasional	8 tahun
3	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut	Koordinator arus lalu lintas kapal	7 tahun
4	Agen Pelayaran A	Pengguna jasa langsung	5 tahun
5	Perusahaan Bongkar Muat B	Pengguna jasa langsung	6 tahun
6	Petugas Operator Inaportnet	Pengelola sistem operasional	3 tahun

Diversitas narasumber ini diharapkan dapat menggambarkan implementasi dari berbagai sudut pandang serta memberikan data yang berimbang dan kaya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kuesioner: Digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan, efisiensi layanan, dan persepsi pengguna terhadap implementasi Inaportnet.
2. Wawancara Terstruktur: Didesain untuk menggali informasi mendalam dari para pejabat struktural dan pengguna jasa.
3. Observasi Langsung: Mengamati interaksi antara pengguna dengan sistem secara langsung di lingkungan kantor KSOP.
4. Analisis Dokumen: Meliputi kebijakan internal, laporan kegiatan, serta dokumen teknis terkait sistem Inaportnet.

Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Pra-Penelitian / Observasi Awal: Untuk mengidentifikasi fokus dan permasalahan penelitian di lapangan.
2. Wawancara: Dilakukan dengan narasumber terpilih secara mendalam dan terstruktur.
3. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): Menggunakan Aplikasi 3AS - CSMS secara daring, yang dilakukan secara periodik oleh penerima layanan.
4. Observasi Partisipatif: Merekam aktivitas pengguna dan operator selama proses pelayanan berbasis Inaportnet.
5. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen pendukung sebagai bahan pembandingan dan penguat data primer.

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sesuai model Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2016), yang mencakup:

1. Reduksi Data (Data Reduction) : Penyaringan data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumen menjadi data yang bermakna.
2. Penyajian Data (Data Display) : Data disusun dalam bentuk naratif, tabel, grafik, atau bagan untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing / Verification) : Kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi hingga data mencapai titik jenuh atau saturasi.

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti telah melakukan observasi awal untuk menentukan fokus dan potensi masalah utama dalam implementasi Inaportnet. Proses analisis terus

berlangsung selama dan setelah pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan keabsahan hasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kantor KSOP Kelas III Sampit

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. KSOP Kelas III Sampit memegang peranan penting dalam pengaturan lalu lintas pelayaran dan kegiatan kepelabuhanan di wilayahnya. Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan, KSOP ini mengimplementasikan sistem Indonesia PortNet (Inaportnet) sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik berbasis digital. Implementasi Inaportnet di KSOP Sampit mulai dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2023. Sebagai sistem pelayanan tunggal berbasis elektronik, Inaportnet bertujuan menyederhanakan proses pelayanan kapal dan barang dengan sistem yang terintegrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan muncul baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun penerimaan pengguna jasa.

### Analisis Implementasi Sistem Inaportnet Tingkat Efektivitas Operasional

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem Inaportnet membawa dampak positif pada efisiensi pelayanan, khususnya dalam hal pengurangan waktu pelayanan dan peningkatan transparansi. Salah satu kepala seksi menyebutkan bahwa “dengan sistem digital, kami bisa melacak setiap proses dan memastikan tidak ada manipulasi data”. Keberadaan jejak digital (log history) mendukung audit internal serta mencegah praktik maladministrasi. Namun demikian, masih terdapat hambatan seperti gangguan jaringan internet dan perangkat keras yang tidak memadai, seperti disampaikan oleh operator pelayanan: “Kadang jaringan internet lambat atau putus, sehingga proses input data menjadi terganggu”.

Tabel 1. Evaluasi Kesiapan SDM dan Infrastruktur Teknologi

Indikator	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan Ideal
Jumlah petugas terlatih	60%	100%
Kestabilan jaringan internet	Sering terganggu	99% uptime
Perangkat keras	Terbatas	Cukup dan terbaru

### Evaluasi Kepuasan Pengguna Jasa

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan melalui aplikasi CSMS pada Triwulan I tahun 2025 menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari 3,2 ke 3,8 dari skala 5. Sebanyak 68% responden menyatakan puas terhadap efisiensi yang meningkat pascaimplementasi Inaportnet, sementara 22% masih mengalami kebingungan, dan 10% menyatakan tidak puas akibat kendala teknis.

Tabel 2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Aspek yang Dinilai	Skor Sebelum Inaportnet	Skor Setelah Inaportnet
Kecepatan layanan	3	4,1
Kemudahan akses sistem	2,9	3,5
Pendampingan teknis pengguna	2,8	3
Transparansi proses layanan	3,2	4,2
Kepuasan keseluruhan	3,2	3,8

### Komunikasi dalam Proses Implementasi

Sosialisasi penggunaan sistem Inaportnet menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan dokumen laporan kegiatan, hanya 62% dari total undangan yang hadir dalam pelatihan, dan sebagian besar peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. Kurangnya pemahaman

teknis dari pengguna jasa memperlihatkan perlunya strategi komunikasi yang lebih masif dan terstruktur.

**Tabel 3. Efektivitas Sosialisasi dan Pelatihan**

Indikator	Hasil
Tingkat kehadiran pelatihan	62% dari total undangan
Tingkat partisipasi aktif	Rendah
Topik tersulit dipahami	Login sistem dan upload dokumen

### Disposisi dan Sikap Stakeholder

Sebagian besar aparat internal menunjukkan sikap positif terhadap sistem ini. Namun, pengguna jasa menunjukkan resistensi, khususnya pelaku usaha kecil yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Masukan dari pengguna menunjukkan bahwa pendampingan teknis masih sangat dibutuhkan. Hal ini mencerminkan pentingnya aspek *disposisi* dalam teori Edward III sebagai faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

### Struktur Birokrasi dan Fragmentasi Prosedur

Implementasi Inaportnet masih menghadapi kendala koordinasi antarunit yang menyebabkan keterlambatan validasi dokumen. Struktur birokrasi yang berlapis menambah beban waktu dan memperlambat alur pelayanan. Salah satu kendala utama adalah ketergantungan pada verifikasi manual karena belum optimalnya sistem integrasi antarinstansi.

### Analisis Berdasarkan Teori George C. Edward III

Penerapan Inaportnet di KSOP Kelas III Sampit dapat dianalisis melalui empat indikator utama Edward III:

1. Komunikasi: Kurangnya transmisi informasi yang konsisten dan menyeluruh kepada semua pengguna jasa.
2. Sumber daya: Ketersediaan SDM belum optimal, serta infrastruktur penunjang seperti jaringan internet dan perangkat keras masih terbatas.
3. Disposisi: Tingkat komitmen internal tinggi, namun belum diimbangi oleh pemahaman eksternal (pengguna jasa).
4. Struktur birokrasi: Koordinasi antarunit dan SOP belum sepenuhnya mendukung kelancaran proses digitalisasi.

**Tabel 4. Analisis Faktor Edward III dalam Implementasi Inaportnet**

Faktor	Temuan Utama
Komunikasi	Sosialisasi terbatas, banyak pengguna belum memahami prosedur digital
Sumber Daya	SDM belum sepenuhnya kompeten, perangkat dan jaringan belum merata
Disposisi	Internal proaktif, eksternal masih resistif terhadap perubahan
Struktur	Birokrasi kompleks, banyak proses masih mengandalkan validasi manual

### Pembahasan Umum dan Refleksi Teoritis

Secara keseluruhan, implementasi Inaportnet menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas layanan kepelabuhanan. Namun, seperti dikemukakan oleh Grindle (1980), efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh dua variabel utama, yakni isi kebijakan dan konteks implementasi. Sistem ini sudah memenuhi kriteria isi kebijakan yang jelas dan terstruktur, tetapi konteks lokal, seperti literasi digital dan kesiapan teknis pengguna, masih menjadi tantangan serius. Dengan demikian, agar manfaat sistem Inaportnet dapat dirasakan secara menyeluruh dan merata, dibutuhkan penguatan dari sisi pelatihan pengguna, modernisasi infrastruktur, serta reformasi struktur birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Inaportnet di KSOP Kelas III Sampit telah berjalan sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan didukung oleh regulasi yang jelas, namun efektivitasnya belum optimal karena masih menghadapi berbagai kendala seperti komunikasi yang belum merata, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kompleksitas birokrasi. Pendekatan top-down dari pengambil kebijakan terbukti penting sebagai motor penggerak, namun keberhasilan implementasi sangat bergantung pada respon dan partisipasi aktif secara bottom-up dari para pengguna jasa pelabuhan. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman dan keterampilan digital dari pengguna jasa, resistensi terhadap perubahan sistem, serta masih adanya birokrasi berlapis yang memperlambat proses pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pada aspek responsiveness, empathy, dan tangibles menjadi sangat penting untuk menjawab harapan pengguna jasa secara maksimal dan memastikan keberhasilan transformasi digital pelayanan kepelabuhanan secara menyeluruh.

## REFERENSI

- Afronyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(1).
- Ali, R., & al., et. (2024). Customer Loyalty Dynamics: The Influence of Halal Certification, Trust, and Brand Preference in the Indonesian Fast-Food Industry. *International Journal of Integrative Sciences*, 3(11), 1305–1320.
- Apriliyanto, N., & Hidayati, N. (2024). Nexus between halal certificate, competitive advantage, and entrepreneurial orientation of SMEs in Food and Beverage industry. *Journal of Enterprise and Development*, 5(Special Issue 1).
- Chaudry, M. S. (2016). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*.
- Djakasaputra, A., & al., et. (2023). The Influence of Halal Certification, Halal Awareness, and Brand Image on Interest in Buying Halal Food Products: An Empirical Study of Consumers in Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 7(2), 103–115.
- Fauzi, M. A., & al., et. (2024). Halal certification in food products: science mapping of present and future trends. *Journal of Islamic Marketing*.
- Fitri, R., & al., et. (2023). Urgency of Halal Certification on the Performance of MSMEs. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(10), 4775–4782.
- Giyanti, I., & Indriastiningsih, E. (2019). Impact of Halal Certification on The Performance of Food Small Medium Enterprises. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 18(2), 116–123.
- Hasanah, H., & al., et. (2023). The Effect of Halal Certification and Entrepreneurial Marketing on the Successful Small and Medium-sized Enterprises of Food Products. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 26(1), 26–36.
- Hidayati, N., & Sunaryo, H. (2021). The Role of Halal Label to Increase the Effect of Attitude Toward Halal Product on Brand Image and Purchase Intention. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 4(5), 744–752.
- Hutabarat, L., & Ivanna, J. (2024). Analisis Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Ismail, M., & Kornitasari, Y. (2022). Socialization of Halal Certification to Develop MSEs: Case Study in Jabung, Malang Regency. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 2(2), 86–92.
- Jamaluddin, J., & al., et. (2022). The problems of implementing Halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A Case Study. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 4(1), 30–36.

- Jannah, S. M., & Al-Banna, H. (2021). Halal Awareness and Halal Traceability: Muslim Consumers' and Entrepreneurs' Perspectives. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 285–316.
- Karimah, N., & Darwanto, D. (2021). Effect of Halal Awareness, Halal Certification, Food Ingredients Composition, Halal Marketing and Religiosity on Purchase Intention of Imported Food Products. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 177–191.